

# MENGUATNYA POLITIK IDENTITAS DAN PROBLEM KERUKUNAN BERAGAMA DI MANOKWARI

**Muhammad Ali Saputra**

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72, Makassar  
Email: dianpermana30@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk mengungkap sejarah dan latar belakang, perkembangan, maupun pengaruh dari politik identitas di Kota Manokwari “Kota Injil” terhadap kerukunan umat beragama di kota tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya, untuk melacak latar belakang dan dampak gerakan politik identitas terhadap suasana relasi antar agama di Manokwari.

Temuan menunjukkan, gerakan politik identitas di Manokwari Kota Injil mulai menyeruak pasca runtuhnya Orde baru, berangkat dari kesadaran akan Manokwari sebagai tanah suci Kristen Papua, sehingga perlu dilembagakan ke dalam regulasi. Namun, pelembagaannya ke dalam regulasi dalam bentuk Raperda berpotensi merusak kehidupan dan kerukunan antar umat beragama. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal kontroversial maupun dampak penerapannya kelak terhadap suasana kerukunan beragama di sana.

**Kata kunci:** Politik identitas, kerukunan umat beragama, Kota Injil

## PENDAHULUAN

Pasca terjadinya gerakan reformasi politik di Indonesia tahun 1998, yang salah satu agendanya adalah demokratisasi dan menggeser sistem sentralisasi politik yang diterapkan oleh penguasa Orde Baru untuk mengontrol publik, terjadi penguatan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Di satu sisi, munculnya apa yang kemudian dikenali sebagai politik identitas ini dipandang sebagai suatu bentuk kritik terhadap ketimpangan yang ada akibat politik dominasi penguasa Orde Baru yang, dengan alasan untuk menjaga kestabilan negara dan pembangunan, meredam ketidakpuasan masyarakat daerah yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan penguasa Orde Baru. Salah satu wujud dari ketidakpuasan tersebut di tingkat lokal adalah tuntutan pemekaran wilayah di sejumlah

daerah sebagai realisasi otonomi daerah. Khusus di wilayah Papua Barat, kemunculan wacana sejumlah elit daerah dan agama di sana memberlakukan Perda Manokwari Kota Injil telah menimbulkan rasa kekhawatiran bagi warga setempat non Kristen terkait prospeknya bagi konflik antar komunal beda agama. Meskipun Perda tersebut diklaim sebagai media untuk merapikan tata kehidupan warga Kota Manokwari supaya lebih tertib, namun disisi lain regulasi di dalamnya bisa menjadi duri bagi warga lainnya yang berbeda identitas keagamaannya, khususnya dalam hal suasana kehidupan antar umat beragamanya yang selama ini relatif aman dan kondusif. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan penelitian untuk melihat relasi dari munculnya politik identitas Kota Injil di Manokwari dan dampaknya terhadap kehidupan kerukunan umat beragama di sana.

Terkait permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengungkap: (1) Sejarah dan latar belakang politik identitas di Kota Manokwari, Prov. Papua Barat; (2) Perkembangan gerakan politik identitas di Kota Manokwari saat ini; (3) Pengaruh gerakan politik identitas di Kota Manokwari terhadap kerukunan umat beragama di kota tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menguraikan sejarah dan latar belakang politik identitas di Kota Manokwari; (2) Mengungkap perkembangan dan pola gerakan politik identitas saat ini di Kota Manokwari; (3) Menguraikan pengaruh politik identitas ini terhadap kerukunan umat beragama di Kota Manokwari. Adapun manfaatnya: (1) Secara praktis, sebagai bahan bagi Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan terkait kerukunan umat beragama; (2) Secara akademis, sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademis yang tertarik dalam hal politik identitas.

Konsep politik identitas baru mengemuka dalam kajian ilmu politik setelah disimposiunkan dalam pertemuan internasional Asosiasi Ilmu Politik Internasional di Wina tahun 1994. Ia disebut pola sebagai biopolitik atau politik perbedaan, yang terakhir ini menurut Agnes Haller menjadi fokus politik identitas (Habibi, 2017:2-3). Sebagaimana pernyataan Stuart Hall, identitas lebih tepat dipahami bukan sebagai sesuatu yang melekat, tapi sebuah proses yang berlangsung terus menerus (Hall dalam Woodward, (ed.), 1997:51). Politik perbedaan, atau *politic of recognition*, sebagai fokus dari politik identitas menurut Heller berangkat dari kesadaran individu untuk menggali identitas-identitas khusus baik dalam bentuk relasi seksual maupun relasi primordial, seperti bangsa, etnis, maupun agama. Politik identitas dapat dimaknai dalam arti positif maupun negatif.

Politik identitas yang muncul sebagai suatu gerakan untuk memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) oleh entitas yang terpinggirkan oleh penguasa merupakan politik identitas yang positif. Manakala politik identitas memunculkan pertentangan antar etnis, kekerasan, intoleransi, penolakan terhadap yang berbeda, serta rasisme, yang demikian ini merupakan politik identitas yang negatif.

Kerukunan atau toleransi beragama mengandaikan suatu hubungan yang baik dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda-beda, setara dalam pengamalan ajaran agama masing-masing. Dalam konteks Indonesia, maka kerukunan umat beragama menjadi isu yang sangat penting, mengingat bangsa kita sejak dahulu kaya akan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, baik yang diakui oleh negara maupun yang tidak diakui.

Menurut Walzer (1997), toleransi beragama dapat dipandang sebagai tahapan penerimaan terhadap perbedaan yang terbagi dalam lima tingkatan: Pertama, menerima perbedaan hanya karena tidak sanggup lagi untuk bertikai, karena perbedaan adalah hal yang tak dapat dihindari. Kedua, mengakui perbedaan tapi tidak menganggapnya sebagai suatu yang bermakna. Perbedaan bukanlah hal yang penting. Ketiga, mengakui “orang yang berbeda” itu memiliki hak namun tak memberikan ruang ekspresi baginya. Keempat, tak semata mengakui perbedaan, namun juga sudah mulai terbuka dan ingin tahu terhadap yang bukan kelompoknya. Kelima, tidak hanya mengakui dan terbuka, tapi juga mendukung, merawat, bahkan merayakan perbedaan. Konsep toleransi aktif ala Walzer ini juga merupakan pluralisme ala Diana L. Eck (Sapriillah, 2014:272).

Pentingnya kerukunan beragama dalam konteks negara dapat dilihat dari diterbitkannya sejumlah regulasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah baik level konstitusi maupun peraturan pemerintah/ menteri, seperti UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 tentang kebebasan beragama, UU No 1/PNPS/1965 tentang larangan penistaan dan penyalahgunaan agama, SK menteri agama dan menteri dalam negeri no.1/1979 tentang tata cara penyiaran agama dan aturan bantuan luar negeri terhadap lembaga swasta untuk kegiatan keagamaan, serta surat edaran menteri agama RI tentang penyelenggaraan hari raya No.MA/432.1981. dan Peraturan Bersama Menteri (PBM), antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 tahun 2006 menyangkut kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan sejumlah cara, antara lain: (1) Wawancara mendalam untuk mengungkap informasi yang berkaitan dengan politik identitas setempat maupun situasi kerukunan beragama di Kota Manokwari; (2) Observasi lapangan, dengan mengamati fakta-fakta di lapangan terkait politik identitas dan kerukunan umat beragama di Kota Manokwari; (3) Studi/telaah terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan penelitian ini, baik menyangkut politik identitas maupun kehidupan umat beragama di Kota Manokwari. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menurut model deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan semenjak data dikumpulkan maupun setelahnya. Data dianalisis berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1984), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2007: 246-253).

### **Sejarah dan Latar Belakang Politik Identitas di Manokwari**

Ada beragam pendapat yang mencoba menjelaskan asal usul kata Papua. Salah satu pendapat menyatakan bahwa Papua berasal dari bahasa Melayu. Dalam kamus Inggris-Melayu karya von de Wall, kata Papua berasal dari “papoewah” yang artinya (1) Guinea baru, dan (2) keriting. Pendapat kedua menyatakan bahwa Papua bukan berasal dari bahasa Melayu, tapi berasal dari salah satu bahasa di Pulau New Guinea atau dari bahasa Alfura yang penduduknya telah lama berhubungan dengan penduduk Pulau New Guinea.

Pendapat ketiga menyatakan, kata Papua berasal dari bahasa Biak. Seorang sejarawan dan misionaris Belanda, F.C. Kanma menyatakan bahwa orang-orang Biak dan Numfor menyebut Kepulauan Raja Ampat sebagai “Sub I Babwa” yang berarti dataran rendah dan tempat terbenamnya matahari. Kata “Babwa” ini kemudian lambat laun berevolusi menjadi Papua untuk penamaan Pulau New Guinea dan penduduknya. (Pamungkas, 2015).

Identitas ke-Papua-an (nasionalisme Papua) tumbuh beriringan dengan sejarah pergolakan di Tanah Papua. Meskipun gerakan nasionalisme Papua kontemporer mulai menemukan lahan subur pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 lalu, namun akarnya mulai tumbuh semenjak periode kolonial Belanda. Menurut Chauvel (2005: ix), nasionalisme Papua terkini dibentuk oleh empat faktor: pertama, orang-orang Papua sama-sama mengalami pengaduan sejarah terkait bagaimana tanah air mereka diintegrasikan ke dalam Indonesia. Kedua, kaum elit Papua merasakan rivalitas dengan pejabat-pejabat asal Indonesia yang mendominasi pemerintahan di wilayahnya baik sejak masa kolonial Belanda maupun

setelah diambil alih oleh Indonesia tahun 1963. Ketiga, pembangunan ekonomi dan administrative di teritori Papua, bersama-sama dengan adanya rasa perbedaan orang Papua dari orang Indonesia, menyuburkan rasa identitas pan-Papua yang lebih berakar luas daripada saat nasionalisme Papua mekar pertama kali di awal tahun 1960-an. Keempat, transformasi demografis masyarakat di Papua, diiringi dengan besarnya arus pendatang dari Indonesia, telah meluapkan perasaan bahwa orang-orang Papua telah direbut haknya dan dipinggirkan.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah mengambil sejumlah langkah-langkah kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat gerakan pembangunan ekonomi yang saat itu gencar digalakkan di seluruh wilayah di Indonesia, antara lain: (1) Sentralisasi pemerintahan dan Indonesianisasi dengan melarang busana tradisional Papua, membatasi praktek dan simbol budaya Papua. Sistem pemerintahan adat yang sebelumnya berlaku di Papua digantikan dengan sistem pemerintahan terpusat, dengan menyerap banyak birokrat dari luar Papua.

Beberapa nama tempat diganti dengan menggunakan nama Indonesia. Pada tahun 1971, digelar operasi koteka dengan mendistribusikan pakaian kepada penduduk asli Papua. Kampanye ini bertujuan untuk mempengaruhi orang asli Papua di pegunungan untuk meninggalkan aspek-aspek kebudayaan asli mereka, bersekolah, menjadi modern secara ekonomi, dan mengadaptasi identitas Indonesia yang lebih umum (Sugandi, 2008:6).

Selain itu, untuk menjaga semangat persatuan, pemerintah melarang segala simbol yang mempertunjukkan identitas lokal bagi warganya, karena bisa menimbulkan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, dan

Antar Golongan) yang dipandang berpotensi memecah kesatuan bangsa dan kestabilan pembangunan. (2) Transmigrasi, mengakibatkan arus pendatang yang meminggirkan orang-orang Papua asli dari tanahnya dan merampas lahan hutan yang sebelumnya adalah milik masyarakat adat menjadi milik negara. Sebagian lahan tersebut dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk para transmigran. Para pendatang ini selanjutnya menjadi pemain kunci sektor perekonomian, sementara orang Papua hanya menjadi pemain kecil saja. Perubahan-perubahan sosial yang berlangsung cepat yang ditimbulkan oleh masuknya para transmigran dan pendatang dari luar Papua tidak hanya mengompromi mobilisasi nasionalis Papua namun, seperti dinyatakan oleh McGibbon (2004: ix), tapi juga menyulut ketegangan antar etnis dan suku di Papua.

Migrasi berskala besar dan pertumbuhan ekonomi yang cepat diiringi oleh meningkatnya persaingan atas lahan dan sumber daya antara pendatang dan komunitas lokal, memeperuncing perpecahan etnis, bahkan di dalam komunitas Papua sendiri. Sebabnya, adalah migrasi internal dan rivalitas memperebutkan peluang ekonomi juga terjadi diantara mereka sendiri. (3) Eksploitasi Sumber Daya Alam Papua utamanya dengan berkolaborasi dengan Perusahaan Asing, paling baik direpresentasikan oleh Freeport, dll. Kendati selama ini Papua diidentikkan sebagai wilayah yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, terutama di bagian barat, tanahnya mengandung kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Pada tahun 1907, kolonialis Belanda sudah mulai melakukan survey kekayaan alam di Papua Barat. Kabar yang lebih menghebohkan lagi muncul setelah Jean Dozy dari perusahaan eksplorasi NNGPM

melaporkan adanya deposit emas dan tembaga terbesar di dunia di sebuah gunung dekat Timika yang sekarang dinamakan dengan Ertzberg pada tahun 1936 (Trajano, 2010:15).

Sejak 1967, dimulailah proyek pembangunan tambang emas terbesar di dunia oleh Freeport yang sekaligus penuh kontroversial. Yang terjadi kemudian adalah, manakala tambang tersebut menjadi tambang uang yang luar biasa bagi Freeport dan koleganya dari kalangan elit-elit pemerintah Indonesia, rakyat Papua masih tetap terkurung dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

### **Perkembangan Gerakan Politik Identitas di Manokwari**

Perkembangan politik identitas di Kota Manokwari tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik identitas di Tanah Papua secara umum, terutama pada periode pasca Reformasi. Selama masa pemerintahan Orde Baru, penduduk Papua banyak yang menjadi korban kekerasan oleh operasi-operasi militer yang dilancarkan pemerintah untuk membungkam resistensi bersenjata oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan membentuk DOM (Daerah Operasi Militer). Terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia terhadap rakyat Papua semenjak berintegrasi dengan Indonesia itu direkam dan selanjutnya diwariskan secara kolektif sebagai *Memoria Passionis* atau Ingatan Penderitaan orang Papua. Sementara di sisi lain juga menjadi termarginalkan oleh arus pendatang dari luar Papua yang pelan-pelan mulai menguasai sektor ekonomi bahkan pemerintahan. Status masyarakat Papua sebagai masyarakat adat yang memiliki hak ulayat atas tanah yang ditempatinya tidak dihormati, tanah dan lahan mereka diambil alih oleh pemerintah untuk

dijadikan lahan pemukiman transmigran, perkebunan, dan pertambangan yang dikelola oleh pihak asing, tanpa memberikan ganti rugi yang memadai kepada pemilik hak ulayat atas tanah tersebut.

Setelah jatuhnya Soeharto dari kepresidenan pada 1998, muncullah apa yang dikenal sebagai Papuan Spring (1999-2000). Orang-orang Papua mulai melakukan aksi-aksi damai untuk menegaskan aspirasi nasionalis mereka dengan mengibarkan bendera bintang Kejora. Ketegangan-ketegangan yang kian memuncak, terutama setelah terjadinya peristiwa Biak Berdarah tanggal 6 Juli 1998 mendorong sejumlah tokoh Papua dari berbagai kelompok yang tergabung dalam Tim 100 mengunjungi Presiden Habibie di Jakarta pada tanggal 26 Februari 1999 untuk menyampaikan aspirasi tuntutan kemerdekaan Papua yang direspon olehnya dengan janji untuk memikirkan aspirasi kemerdekaan tersebut dan membangun suatu dialog anatar Jakarta-Papua. Ekspresi-ekspresi kemerdekaan Papua juga diberi ruang oleh presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, yang mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora berdampingan dengan bendera Indonesia dan penggantian nama Irian menjadi Papua. Para pemimpin dari seluruh tanah Papua mulai mendapatkan ruang untuk membentuk front dan mengembangkan strategi politis selama Musyawarah Besar (Februari, 2000) lewat Presidium Dewan Papua yang, meskipun agendanya adalah Papua yang merdeka, tapi memilih strategi dialog tanpa kekerasan dengan Jakarta, dan Kongres Rakyat Papua (Mei-Juni, 2000) (Timmer, 2014:602).

Merespon adanya aspirasi-aspirasi kemerdekaan yang disuarakan oleh tokoh-tokoh pemimpin Papua, pemerintah menyikapi dengan menawarkan suatu model otonomi khusus (otsus). Pemberian status

otonomi khusus bagi Papua dipandang sebagai respon Pemerintah Pusat di Jakarta untuk meredam tuntutan kemerdekaan di Papua. Otsus menawarkan otonomi yang lebih luas bagi komunitas-komunitas Papua berikut institusi-institusinya, dan yang terutama jumlah dana yang lebih besar yang didapatkan dari proyek penyerapan sumber daya alam di Papua, hingga mencapai 70% dari industri minyak dan gas dan 80% dari industri tambang. Sejalan dengan berlakunya otsus, pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan pemekaran wilayah Papua yang juga dimanfaatkan oleh sejumlah elit politik di daerah itu untuk menanggung keuntungan (Timmer, 2014:608).

Apabila pada masa Orde Baru, politik identitas dipandang sebagai hal yang tabu karena dipandang dapat merusak persatuan bangsa maupun mengganggu stabilitas pembangunan sekaligus menjadi benih separatisme, maka pada periode reformasi pasca Orde Baru, gejala politik identitas tumbuh subur dan dipandang sebagai penguatan identitas masyarakat lokal, tak terkecuali di tanah Papua secara umum, dan Manokwari secara khusus.

Kelompok-kelompok identitas yang muncul tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam: (1) Kelompok identitas lokal yang berorientasi etnis/adat, adalah kelompok identitas yang perjuangannya diarahkan untuk merevitalisasi kembali supremasi dan tatanan adat di kalangan masyarakat asli Papua yang selama era Orde Baru dinafikan. Kelompok ini direpresentasikan antara lain oleh dewan adat, lembaga masyarakat adat. (2) Dewan Adat Papua (DAP), merupakan lembaga tradisional masyarakat adat Papua yang misinya adalah memperjuangkan hak-haknya, menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyatan dan mempercepat pembangunan di Papua secara

lebih partisipatif, merata, dan berkelanjutan. DAP membagi tanah Papua ke dalam tujuh wilayah adat. Setiap wilayah adat dibawah oleh Dewan Adat masing-masing wilayah.

Manokwari termasuk ke dalam wilayah adat III Bomberay yang membawahi 52 suku yang berada di wilayah di Papua Barat Laut, meliputi Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, Inawatan, Ayamaru, Aifat, dan Aitinyo. (3) Kelompok identitas lokal yang berorientasi keagamaan, yang memperjuangkan supremasi suatu agama di dalam masyarakat. Misalnya, GKI di Tanah Papua yang mewakili kelompok Kristen dan Majelis Muslim Papua yang mewakili kelompok Islam. GKI di Tanah Papua merupakan denominasi Gereja terbesar di Papua yang beraliran Calvinis dan berdiri pada tanggal 26 Oktober 1956.

Gereja yang memiliki 42 klasis ini bukan gereja suku, namun gereja oikumenis, sehingga anggota jema'atnya ada yang berasal dari orang Papua asli maupun non Papua. Majelis Muslim Papua (MMP) dibentuk tanggal 13 April 2007 sebagai lembaga muslim asli Papua yang bertekad untuk menegakkan identitas budaya rakyat Papua dan nilai-nilai universal Islam. (4) Kelompok identitas lokal yang berorientasi politik, salah satunya adalah KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang memperjuangkan disintegrasi Papua dari Indonesia dengan dilandasi semangat nasionalisme Papua yang merdeka.

Perjuangannya yang awalnya menggunakan ideologi perjuangan damai, namun selanjutnya bertransformasi menjadi lebih radikal. KNPB dibentuk tahun 2008 dengan Buchtar Tabuni sebagai ketua. Komite ini adalah suatu varian lain dari pergerakan mahasiswa Papua yang sudah ada, seperti AMP (sayap politik OPM) dan IPWP

yang pro kemerdekaan dan AMPTPI yang lebih moderat. KNPB, selain memboikot Pemilu, berusaha memperlihatkan kepada dunia Internasional bahwa Papua adalah zona darurat. (ICG, 2010: 5-12). (5) Majelis Rakyat Papua (MRP), adalah lembaga representasi kultural masyarakat asli Papua yang dibentuk berdasarkan PP No. 54 Tahun 2004 dan menjadi ciri khas otonomi khusus di Papua.

Lembaga ini memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelestarian dan perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana ditegaskan dalam UU Otsus Papua. MRP memiliki tiga pokja, yaitu adat, perempuan, dan agama. Dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang otsus Papua, dinyatakan bahwa, anggota MRP adalah orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil perempuan, dan wakil-wakil agama. Keanggotaannya diatur dalam PP No. 54 Tahun 2004 tentang MRP. Fungsi yang diemban MRP diimplementasikan ke dalam bentuk: kontrol eksekutif dan legislatif, menjawab riil kesejahteraan Papua, memperjuangkan kesehatan Papua, dan bidang sosial kemasyarakatan (Way, dkk, t.t.: 7-9). Setelah berdirinya Prov. Papua Barat, sejumlah anggota MRP yang berkedudukan di Jayapura pindah ke sana dan membentuk MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat).

### **Politik Identitas dan Kerukunan Umat Beragama di Manokwari**

Terjadinya sejumlah kasus yang terkait dengan kerukunan umat beragama, antara lain yang diilustrasikan oleh kasus perlawanan terhadap pembangunan Masjid di Distrik Andai sejak tahun 2015 lalu oleh sejumlah tokoh Gereja Kristen lokal di Manokwari,

dibarengi dengan adanya keinginan untuk menunjukkan supremasi Kristen di Manokwari melalui pengajuan draft rancangan Perda Manokwari Kota Injil setidaknya menyiratkan adanya pertarungan identitas di belakangnya.

Kasus Pembangunan Masjid Andai Pada awal tahun 2015, salah seorang tokoh pendatang yang memiliki usaha kontraktor lokal bernama H. Appe merintis pembangunan masjid di sebuah lahan di Jl. Trikora Km 19 Kelurahan Andai, Kec. Manokwari Selatan. Masjid tersebut mulai dibangun sekitar April 2015 dan menempati lahan milik beliau yang luasnya mencapai 30 hektar. Masjid ini memiliki letak yang berdekatan dengan Kompleks Balai Diklat Milik Pemerintah Prov. Papua Barat dan dikelilingi oleh bukit. Letaknya agak jauh dari pemukiman terdekat. Menurut keterangan dari beliau, yang juga seorang tokoh Jama'ah Tabligh setempat, rencana pembangunan masjid ini sudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006, termasuk mendapatkan izin dari pimpinan masyarakat adat setempat yang memiliki hak ulayat atas tanah di daerah tersebut, yaitu Suku Mansim.

Belakangan, pembangunan masjid ini mendapatkan penolakan dari kelompok Kristen di Manokwari. Bangunan masjid yang diperkirakan berukuran 50 x 40 m<sup>2</sup> ini dianggap terlalu besar melampaui masjid-masjid yang lazim ditemui di sana, yang umumnya berukuran tidak lebih dari 20 x 20 m<sup>2</sup>. Keberadaan bangunan masjid dengan ukuran sebesar itu dianggap “melukai perasaan umat Kristen dan menistakan kesucian Kota Manokwari sebagai Kota Injil”. Sebaliknya, Pihak Gereja, seperti dinyatakan Badan Pekerja GKI di Tanah Papua, menolak pembangunan masjid

tersebut, karena, selain belum mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat adat setempat, juga karena pembangunannya berada di situs Zending Andai, sehingga akan berdampak buruk pada mayoritas umat Kristen di wilayah itu. Ada 33 denominasi gereja di Prov. Papua Barat yang disebutkan ikut dalam aksi penolakan tersebut.

Meskipun sebelumnya telah diadakan sejumlah pertemuan dengan melibatkan banyak pihak, baik pihak adat, DPRD, Kapolda, Kapolres, Dandim, bahkan tim utusan dari Menteri Hukum dan HAM. Namun pembangunan masjid tersebut tetap berjalan. Puncaknya, tanggal 29 Oktober 2015, umat Kristen melakukan demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bupati Manokwari di Sowi Gunung. Demo tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh gereja, gembala, kelompok mahasiswa Kristen, maupun Ikatan Kerukunan Umat Kristen di Papua Barat dengan membawa berbagai spanduk.

Di hadapan Bupati Manokwari, Bastian Salabay, Wakil Ketua Klasis GKI Tanah Papua Manokwari, Pendeta J. Mamoribo membacakan sejumlah tuntutan, dan yang terpenting adalah bahwa demi menegakkan status Manokwari sebagai Kota Injil dan Pusat Peradaban Orang Papua, maka kepada Bupati agar: tidak mengeluarkan izin pembangunan masjid dan aktivitas lainnya di wilayah kerja Zending Andai; agar meminta Kapolres memanggil H. Appe yang dianggap tidak kooperatif, dan; agar segera mengesahkan raperda Manokwari Kota Injil yang sudah pernah diserahkan kepada DPRD, menjadi produk hukum dalam rangka Otsus Papua sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001, dan; agar bersama dengan pimpinan TNI/POLRI, menertibkan upaya pembangunan wilayah kerja Zending di Andai.

Meskipun Bupati Salabay, yang berlatar belakang rohaniawan GPKAI (Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia) telah menandatangani SK No. 450/546 tertanggal 1 November 2015 yang melarang kelanjutan pembangunan masjid di Andai, dan masih adanya ancaman dari pihak Kristen untuk menghentikan secara paksa, namun pembangunan masjid tersebut tetap berjalan.

### **Raperda Manokwari Kota Injil**

Gagasan mengenai Manokwari Kota Injil oleh penggagasnya dipandang berakar dari sejarah Kristen di Tanah Papua, dimana pada Tanggal 5 Februari 1855, dua orang misionaris dari Jerman, C.W. Ottow dan G.J. Geissler berlabuh di Pulau Mansinam dengan mengucapkan, “Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini”. Kalimat ini kemudian dipercayai oleh orang-orang Papua menunjukkan penetapan status Manokwari sebagai Kota Injil oleh Tuhan.

Menurut salah seorang tokoh Gereja setempat yang menjabat sebagai ketua PGG PB, munculnya Raperda Manokwari Kota Injil ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap situasi sosial di sana, di mana masih banyak orang Papua yang suka melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan agama, utamanya mabuk-mabukan yang berujung pada tindak kekerasan seperti pemalakan dan perkelahian, dan keprihatinan akan maraknya lokalisasi dan panti pijat yang berpotensi menjadi sumber penyebaran HIV/AIDS. Namun, di samping itu, terutama setelah adanya kasus rencana pembangunan masjid raya/Islamic Center di Manokwari, pada bulan Februari 2006, GKI menyepakati perlunya implementasi Perda Manokwari Kota Injil.

Berbeda dengan kasus rencana pembangunan masjid raya dan masjid Andai yang diprotes oleh pihak Kristen, maka



Raperda Manokwari Kota Injil disoroti secara tajam oleh pihak agama lain, utamanya umat Islam. Beberapa pasal yang diatur dalam Raperda tersebut dikritik karena mendiskriminasi umat Islam. Pasal tersebut antara lain yang mengatur pemasangan simbol Agama (Kristen) di Perkantoran dan Tempat-Tempat Umum, larangan penggunaan busana yang menonjolkan simbol keagamaan di tempat-tempat umum, yang ditafsirkan sebagai larangan penggunaan jilbab bagi perempuan muslim. Isu ini mencuat secara nasional dan menimbulkan kritik pedas dari tokoh dan organisasi Islam nasional. Bahkan, organisasi gereja seperti KWI dan PGI juga melakukan penolakan terhadap Raperda ini.

### **Persepsi Ketimpangan Dalam Relasi Antar Agama di Manokwari**

Munculnya tiga kasus yang disebut di atas menunjukkan bahwa apa yang tampak di permukaan memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara umat beragama di Manokwari yang selama ini diklaim berjalan harmonis. Ketegangan-ketegangan yang timbul menyiratkan bahwa relasi antar agama di kota ini belumlah setara. Memang, dari segi komposisi penduduk, penganut Kristen di Manokwari paling dominan, hampir mencapai 65% dari total penduduk. Namun, tidak semuanya orang Papua setempat, mengingat banyak juga kaum pendatang yang menetap disini, terutama dari wilayah Toraja, Batak, Manado, Maluku, maupun Papua pendatang.

Menurut seorang akademisi pengamat sosial keagamaan dan tokoh agama setempat, kebijakan yang dilakukan oleh Pemda setempat cenderung memfavoritkan salah satu kelompok agama, yaitu Kristen. Bantuan-bantuan mengalir ke kelompok tersebut untuk membangun tempat-tempat

ibadahnya sesuai dengan proposal yang diajukan. Kasarnya, nilai bantuan tersebut bisa mencapai 10 milyar ke atas setiap tahunnya. Sementara untuk kelompok-kelompok organisasi Islam, bantuan finansial yang diharapkan dari Pemda malah minim, terkecuali lembaga seperti MUI. Untuk kelompok Kristen, selain bantuan dana pembangunan tempat ibadah, Pemda setempat setiap tahunnya juga mengirimkan membiayai perjalanan para tokoh Kristen/Gereja setempat ke Kota Yerusalem dengan dalih kunjungan kerohanian dan pembunaaan mental. Kegiatan kunjungan kerohanian ini mulai marak dilakukan setelah Papua menikmati status otonomi khusus. Bantuan-bantuan terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan ini, menurutnya, tidak dipublikasikan secara transparan ke publik, sehingga nilai pastinya tidak dapat diketahui.

Pada umumnya, tokoh-tokoh Gereja di Manokwari mengklaim bahwa Papua itu identik dengan Kristen. Ini merujuk pada saat peristiwa historis Pekabaran Injil pertama kali merambah Tanah Papua. “Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini” demikian kalimat yang diwartakan diucapkan oleh dua orang missionaris Jerman saat mendarat di P. Mansinam (Hummel, 2012: 47). Ini dijadikan landasan untuk mengklaim Tanah Papua sebagai tanah yang suci, dan Manokwari sebagai Kota Injil. Namun, ajaran Kristen baru berkembang pesat di tanah Papua pada abad ke-20 M, dari kampung ke kampung oleh para Penganjil yang didatangkan dari Maluku. Sementara, penyebaran Katolik berawal di Fak Fak tahun 1894, hingga ke Merauke. Pemerintah kolonial Belanda dari tahun 1912 hingga 1928 mengambil kebijakan untuk membagi wilayah missionaris: Kristen di bagian Utara Papua, dan Katolik di bagian Selatannya (Hummel, 2012: 50-51).

Agama Islam bukanlah pendatang baru di Papua. Diperkirakan, sejak awal abad ke-16 M, Kesultanan Tidore telah mengklaim Manokwari sebagai wilayah pedalamannya, namun tidak mampu membentuk pemerintahan regular di sana. Namun, berkat pengaruh muslim dari Maluku itu, beberapa wilayah di Papua, seperti Fak Fak, Kaimana, Teluk Bintuni, kepulauan Radja Ampat, Sorong memiliki populasi penduduk asli yang menganut agama Islam (Hummel, 2012: 53).

Menyangkut konstruksi identitas Papua Kristen, Pamungkas (2008) menyatakan bahwa pengakuan agama Kristen sebagai agama orang asli Papua terbentuk sejak lama melalui diskursus Gereja Kristen dan proses sosial. Misi Zending berperan dalam memproduksi pengetahuan tentang identitas orang Papua. Ia mengutip Pdt. Mth. Mawene yang menafsirkan syair Ottow dan Geissler saat pertama menjamah Papua, bahwa ucapan tersebut menjadi bukti rumus penaklukan yang berarti sejak itu tanah dan penduduknya resmi milik Allah dan Allah berkuasa atasnya dan semua kehendak-Nya haruslah ditaati di atas tanah Papua itu. Dari segi proses sosial, strategi perjuangan orang Papua dalam meraih haknya untuk menentukan nasibnya sendiri seperti “Papua Tanah Damai” dan “Papua Diberkati Tuhan”.

Manokwari pada dasarnya belum pernah mengalami konflik antar agama dalam bentuk kekerasan fisik. Selama ini, yang terjadi adalah konflik yang terjadi antara kelompok pendatang dan penduduk asli Manokwari dan tidak disulut oleh faktor agama. Dalam realitas sehari-hari, ketimpangan antara kedua kelompok ini dapat diamati pada sentra dagang tradisional. Kelompok pendatang yang berasal dari Jawa, Sulawesi, Maluku dan beberapa daerah lainnya menguasai sektor-sektor ekonomi informal di Manokwari. Jika di pasar-pasar

tradisional, mereka biasanya mendirikan lapak-lapak kios semi permanen hingga permanen, maka perempuan-perempuan asli Papua hanya menggelar dagangan hasil buminya beralaskan karung atau Koran (Suryawan, 2011:293). Beberapa pendatang lain mendatangi pemukiman yang dihuni oleh warga Kristen di sana untuk menawarkan buku-buku tentang Islam ataupun mengajukan permohonan sumbangan untuk masjid-masjid di daerah asalnya. Hal ini dipandang seolah-olah di Manokwari ada proses Islamisasi.

Pihak Panitia Pembangunan Masjid Andai, menurut seorang tokoh Gereja di Manokwari, tidak menghargai status Manokwari sebagai Kota Injil dengan membangun masjid di wilayah Andai, yang merupakan situs historis Pekabaran Injil milik Zending di Kota Manokwari. Wilayah Andai merupakan tanah yang pertama kali didatangi oleh Misi Zending saat mendarat di Kota Manokwari. Terdapat sejumlah peninggalan Zending di situ, antara lain Sekolah Tinggi Theologia (STT) Eriksson.

Membangun masjid di tempat tersebut diibaratkan dengan membangun Gereja di Aceh. Terhadap yang disebut terakhir ini, pihak Gereja setempat nampaknya menganalogikan Manokwari sebagai Kota Injil dengan Aceh Sebagai Serambi Mekkah. Namun, mereka juga mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana yang menyangkut apa yang disebut sebagai sikap diskriminasi pemerintah R.I. terhadap warga yang beragama Kristen, seperti aksi pengrusakan dan pembakaran Gereja di Singkil maupun kasus penolakan pembangunan Gereja di Bogor. Apabila Aceh dipandang memberlakukan Hukum Syariah Islam, maka Pihak Kristen di Manokwari juga berhak memberlakukan Perda Kota Injil.

Rancangan Perda Manokwari Kota Injil pada dasarnya dipandang baik, karena mencoba mengembalikan kebudayaan lokal dan mengatasi problem sosial yang terjadi Kota Manokwari, seperti kriminalitas, mabuk-mabukan, maupun prostitusi yang kian marak. Namun, Rancangan Perda tersebut memiliki sejumlah muatan yang dipandang sebagai bentuk politik identitas yang mencoba menegaskan hegemoni Kristen terhadap agama-agama lain di Manokwari.

Sebagai contoh, usulan dalam Perda untuk melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan di tempat-tempat umum dianggap sama dengan membatasi penganut agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Maka, wanita muslim dilarang mengenakan jilbab (karena dianggap sebagai simbol Islam) di tempat-tempat umum, padahal hal tersebut dipandang sebagai salah satu perintah agama dan bentuk ketaatan kepada Tuhannya, sementara di sisi lain, muncul aturan yang membolehkan pemasangan simbol-simbol Kristen (dianggap sebagai agama mayoritas penduduk Manokwari) di kantor-kantor pemerintah (padahal, para pegawainya memiliki heterogenitas agama) merupakan suatu bentuk tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh negara. Ide Raperda Injil ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan tokoh agama. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Manokwari, Barnabas Mandacan bahkan mendesak DPRD Manokwari untuk segera mengesahkan Raperda tersebut. Menurutnya, Perda tersebut bertujuan positif untuk mengatur masyarakat Manokwari yang heterogen untuk lebih harmoni sesuai dengan tuntunan Alkitab.

Salah satu manifestasi dari politik identitas Manokwari Kota Injil ini dalam ranah politik adalah bahwa Bupati Manokwari selalu beragama Kristen. Bahkan,

Bastian Salabay, Bupati Manokwari Periode 2010-2015 adalah seorang pendeta Gereja Kristen GPKAI di Manokwari yang berlatar belakang pendidikan Teologi Kristen, dan beliau pulalah yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara pembangunan masjid di Andai. Namun, saat *incumbent* kembali bertarung untuk periode berikutnya, justru kalah dari pasangan Demas Paulus Mandacan yang beragama Kristen dari Suku Arfak berlatar belakang birokrat dan beristrikan orang non Papua dan Eddy Budoyo yang Islam dari suku Jawa, seorang birokrat dan beristrikan orang Papua.

Menurut keterangan seorang tokoh Islam di Manokwari, pasca munculnya kasus Masjid Andai, penduduk Muslim Manokwari mulai mengkonsolidasikan diri menghadapi pilkada tersebut. Bakal Wabupati Eddy Budoyo disebut menjanjikan komitmen untuk mendukung diteruskannya pembangunan masjid Andai tersebut dan mengkonsultasikannya dengan bakal Bupati Paulus Demas Mandacan. Konsolidasi penduduk Muslim di Manokwari dalam pilkada tersebut disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang ikut mengantarkan Pasangan Demas Mandacan-Eddy Budoyo sebagai pemenang Pilkada. Sementara Salabay yang diharapkan akan bertindak lebih tegas terhadap pembangunan masjid Andai gagal terpilih lagi. Kasus pembangunan Masjid Andai ini, seperti diakui oleh seorang pejabat di Kantor Kemenag Manokwari, agak mempengaruhi hubungan antara tokoh agama di FKUB setempat dimana tokoh Islam sudah jarang hadir di sana.

Meskipun begitu, di luar aksi demo penolakan masjid Andai, di Manokwari belum ada upaya-upaya yang mengarah pada tindak kekerasan seperti perusakan masjid ataupun aksi balasan serupa dari penduduk muslim lokal. Jika pihak Kristen mengklaim

Manokwari Kota Injil, maka tokoh-tokoh Islam setempat menyatakan bahwa Islam telah lebih dahulu hadir di Tanah Papua melalui pengaruh Kesultanan Tidore dibandingkan dengan misionaris. Mereka menyatakan, pihak Kristen harus mengingat bahwa kedatangan kedua missionaris Jerman, Ottow dan Geissler ke Pulau Mansinam adalah juga berkat restu dari Sultan Tidore yang bahkan menulis permintaan kepada pimpinan suku di sana agar membantu kedua misionaris tersebut selama bermukim di sana. Jadi, Sultan Tidore ikut berjasa dalam Pekabaran Injil di Papua. Oleh karena itu, mereka menuntut Raperda Manokwari Kota Injil dievaluasi kembali dan direvisi agar bisa diterima penduduk muslim setempat.

## **PENUTUP**

Politik Identitas di Manokwari dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi terutama setelah Indonesia mengambil alih Papua dari tangan Belanda sejak tahun 1963 setelah Kesepakatan New York. Proses integrasi tersebut dianggap oleh nasionalis Papua sebagai perampasan kemerdekaan secara paksa, karena tidak melibatkan orang-orang Papua. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada era Orde baru terhadap Papua, seperti Indonesianisasi, transmigrasi penduduk non Papua ke wilayah Papua, eksploitasi masif kekayaan alam Papua, maupun pendekatan keamanan yang mengakibatkan pelanggaran HAM oleh pihak militer, serta pelarangan ekspresi terhadap simbol dan identitas budaya lokal, maupun kesadaran akan sejarah dan peran Zending Kristen sebagai sumber peradaban Tanah Papua nantinya, setelah era reformasi, ikut membentuk politik identitas di Manokwari sebagai bagian dari Tanah Papua.

Perkembangan politik identitas di Manokwari terutama aktif setelah jatuhnya

pemerintah Orde baru. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok identitas berbasis ke-Papua-an baik yang mengusung misi politik anti integrasi (seperti KNBP), penguatan masyarakat adat (DAP dan LMA) maupun berbasis agama (Manokwari Kota Injil dan kelompok Gereja yang berada di belakangnya).

Politik identitas yang berkembang menjadi wacana dominan di Manokwari adalah Manokwari Kota Injil. Politik identitas ini berbasis keagamaan ini merupakan suatu upaya untuk menegakkan supremasi Kristen di Manokwari maupun di Tanah Papua. Namun, implikasinya, melalui kasus pembangunan Masjid Raya tahun 2005, masjid Andai Tahun 2015, maupun gagasan Raperda Manokwari Kota Injil, politik identitas tersebut cenderung menjadi alat untuk mendominasi agama selain Kristen di Manokwari dan berpotensi mengganggu kerukunan beragama jika tidak dikoreksi dan dibahas kembali secara bersama-sama untuk dirumuskan dalam bentuk yang lebih toleran.

Persoalan yang timbul di Manokwari adalah manakala politik identitas Manokwari Kota Injil mengembangkan hegemoni dan dominasi terhadap agama lain di Kota Manokwari dan menjadi politik diskriminatif. Olehnya itu, pemerintah melalui kemenag setempat maupun pemda hendaknya ikut berpartisipasi secara aktif dalam upaya-upaya untuk merumuskan kembali gerakan politik identitas Manokwari Kota Injil agar tidak menghambat dan mendiskriminasi agama lain. Perhatian dan dukungan hendaknya juga diberikan terhadap agama lain yang minoritas di sana, agar tidak terjadi kecemburuan antar penganut agama yang berpotensi memperbesar konflik antar agama di Manokwari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chauvel, Richards. 2005. *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptations*. Washington: East-West Center.
- Djaya, Mulyadi. t.t. *Budaya Pertanian Papua: Perubahan Sosial dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Arfak*. Yogyakarta: Karta Media.
- Habibi, Muhammad. 2017. "Analisis Politik identitas di Indonesia". [https://www.researchgate.net/publication/315338050\\_Identity\\_Politics\\_in\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/315338050_Identity_Politics_in_Indonesia).
- Hummel, Uwe. "Mansinam: Centre of Pilgrimage, Unity, and Polarisation in West Papua". Dalam *Melanesian Journal of Theology* 28-1, 2012.
- ICG. Ketegangan Antar Agama di Papua. *Asian Report No. 154, 16 Juni 2008*.
- ICG. Radikalisasi dan Dialog di Papua. *Asian Report No. 188 – 11 Maret 2010*.
- McGibbon, Rodd. 2004. *Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and Papua Conflict*. Washington: East-West Center.
- Pamungkas, Cahyo. "The Contestation of Muslim and Special Autonomy in Papua". Dalam *Religio: Jurnal Studi-Studi Agama, Vol. 5 No. 1, Maret 2015*.
- Saprillah. "Mengukur Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Konawe Selatan", dalam Jurnal "Al-Qalam" Vol.20 No. 2 Desember 2014.
- Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawan, I Ngurah. "Antropologi Gerakan Sosial: Membaca Transformasi Identitas Budaya di Kota manokwari, Papua Barat". Dalam *Humaniora Vol. 23 No. 3, Oktober 2011*.
- Timmer, Jaap. "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elite di Papua". Dalam Nordholt, H.S, van Klinken, Gerry. (Ed.). 2014. *Politik Lokal di Indonesia*. Terjemah oleh Bernard Hidayat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.
- Trajano, J.C.I. "Ethnic Nationalism and Separatism in West Papua, Indonesia". Dalam *Journal of Peace, Conflict, and Development*, [www.peacestudiesjournal.org.uk](http://www.peacestudiesjournal.org.uk), Issue 16, November 2010.
- Walzer, Michael. 1997. *On Toleration*. Yale University Press : New Haven and London
- Way dkk. t.t. *Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. Makalah Penelitian.
- Woodward, K, Motherhood. 1997. "Identities, Meanings and Myths' dalam K. Woodward (ed) *Identity and Difference*. London and Thousand Oaks, CA: Sage.